



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 313 /404.012/B/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/834/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruang semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan stock opname barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KETIGA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;

2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMGR : 188/ 313 /404.012/B/2021

TANGGAL : 29 Desember 2021

DAFTAR PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

NG	DINAS / INSTANSI	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH	JGHAN KURNIAWAN, SE 19820421 201101 1 016	Pengurus Barang Pengguna
2	SEKRETARIAT DPRD	HERI SUSANTO 19820511 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna
3	RSUD Dr. SGEROTO	ETIK PUJIARSIH, S.Sos 19811020 200901 2 004	Pengurus Barang Pengguna
4	INSPEKTGRAT	DGNNY SULISTYO HARTGNO 19760706 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	DADANG RACHMAT HIDAYAT 19750521 200701 1 020	Pengurus Barang Pengguna
6	BADAN KEUANGAN	MARSUDIN 19760211 200501 1 005	Pengurus Barang Pengguna
7	BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	HESTI DWI KUSUMANINGTYAS, SE 19690804 200901 2 002	Pengurus Barang Pengguna
8	BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	HENKY DWI FIRMANSYAH 19830321 201001 1 005	Pengurus Barang Pengguna
9	DINAS PENDIDIKAN	ANASABILUL MUTTAQIEN 19810330 200701 1 003	Pengurus Barang Pengguna
10	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN GLAHRAGA	BUDI UNTORO 19850208 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	HARI PURNAWAN 19780719 200901 1005	Pengurus Barang Pengguna
12	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	ENJELLIYA DWI ARI. P 19850301 201001 2 002	Pengurus Barang Pengguna
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	ARI RUSLIANA NURKHGLIS 19780503 200901 1 002	Pengurus Barang Pengguna
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	FEBRI ANSGRI 19820201 200801 1 010	Pengurus Barang Pengguna

1	2	3	4
15	DINAS PERTANIAN	SUWIGNYG 19751104 200901 1 003	Pengurus Barang Pengguna
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	SOPINGI 19650213 198903 1 009	Pengurus Barang Pengguna
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	HERU DARYANTO 19800505 201001 1 007	Pengurus Barang Pengguna
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	HANANTO 19810328 200801 1 008	Pengurus Barang Pengguna
19	DINAS KESEHATAN	EKO PRASETYG,A.Md.ARO 19790119 200312 1 007	Pengurus Barang Pengguna
20	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	TRI BUDI HARTONG, SP 19710405 201212 1 003	Pengurus Barang Pengguna
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BASUKI RAHMAD 19680515 2007011 042	Pengurus Barang Pengguna
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ENDANG SULISTYOWATI,S.Sos 19730422 200801 2 004	Pengurus Barang Pengguna
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	YUDI IRVAN KUSNANTO 19850330 200901 1 003	Pengurus Barang Pengguna
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DWI ARSO YUDIANTO 19780401 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna
25	DINAS SOSIAL	SARMI 19790616 200701 2 015	Pengurus Barang Pengguna
26	DINAS PERHUBUNGAN	YENI HERDIANA, SE,MM 19761103 200801 2 009	Pengurus Barang Pengguna
27	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PGLITIK	NUR RIYADI, SE 19850613 201101 1 018	Pengurus Barang Pengguna
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SUMIRAN 19771005 200701 1 009	Pengurus Barang Pengguna
29	KEC. SINE	UNTIN KUSRIANTI 19781020 200801 2 023	Pengurus Barang Pengguna
30	KEC.NGRAMBE	ANGGORO DISWANOTO 19831226 200901 1 004	Pengurus Barang Pengguna
31	KEC. JOGOROGO	SIGIT ANDRIANTO 19780706 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna

1	2	3	4
32	KEC.KENDAL	SUROSO 19800620 201001 1 004	Pengurus Barang Pengguna
33	KEC.GENENG	SUCI WAHYUNI 19840922 201001 2 001	Pengurus Barang Pengguna
34	KEC. KWADUNGAN	YULIA DWI LESTARI 19830709 200901 2 004	Pengurus Barang Pengguna
35	KEC. KARANGJATI	LUZYANA RETNANINGTIAS 19850322 201001 2 002	Pengurus Barang Pengguna
36	KEC. BRINGIN	DIDIK BUSTANUL MA'ARIF 19780620 201001 1 003	Pengurus Barang Pengguna
37	KEC.PADAS	SUTRISNO 19761002 200901 1 004	Pengurus Barang Pengguna
38	KEC.NGAWI	ARIF DWI FITRIYANTO 19840720 200901 1 008	Pengurus Barang Pengguna
39	KEC. PARON	ENI SULIS SETIYOWATI 19840306 201001 2 001	Pengurus Barang Pengguna
40	KEC. KEDUNGGALAR	AGUS PRASETYO 19830810 200801 1 016	Pengurus Barang Pengguna
41	KEC. PITU	MURDIYANTO 19840512 201001 1 002	Pengurus Barang Pengguna
42	KEC. WIDODAREN	DIYAH AYU NURWARDANY 19851006 201001 2 001	Pengurus Barang Pengguna
43	KEC. MANTINGAN	GUNAWAN 19800827 200801 1 015	Pengurus Barang Pengguna
44	KEC.KARANGANYAR	SHOFI NUR HIKMAH 19810117 200701 2 004	Pengurus Barang Pengguna
45	KEC. GERIH	SUHARNO 19760426 200701 1 009	Pengurus Barang Pengguna
46	KEC. KASREMAN	DHADHANG WAHYU WIBOWO 19791216 200901 1 004	Pengurus Barang Pengguna
47	KEC. PANGKUR	YULIANAWATI 19850308 201001 2 001	Pengurus Barang Pengguna

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO